

Menjaga Ruang Fiskal di Tengah Tekanan Pembiayaan

Riza Annisa Pujarama

22 Juli 2026

INDEF



INDEF

Laporan Sementara APBN Semester I-2026

Uraian (dalam triliun rupiah)	APBN 2025	2025		2026			
		LKPP (Audited)	Growth (%)	APBN	Outlook	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	2.765,1	(3,0)	3.153,6	3.208,1	101,7	16,0
I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	2.218,2	(0,6)	2.693,7	2.631,4	97,7	18,6
1. Penerimaan Pajak	2.189,3	1.917,9	(0,7)	2.357,7	2.310,8	98,0	20,5
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	300,3	0,0	336,0	320,6	95,4	6,8
II. PNBPN	513,6	541,5	(7,3)	459,2	575,1	125,2	6,2
III. Penerimaan Hibah	0,6	5,4	(84,2)	0,7	1,5	227,5	(72,1)
B. BELANJA NEGARA	3.621,3	3.435,5	2,3	3.842,7	3.942,4	102,6	14,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	2.586,4	3,6	3.149,7	3.245,5	103,0	25,5
1. Belanja K/L	1.160,1	1.483,8	12,1	1.510,5	1.630,4	107,9	9,9
2. Belanja non-K/L	1.541,4	1.102,6	(5,9)	1.639,2	1.615,1	98,5	46,5
II. Transfer Ke Daerah	919,9	849,0	(1,7)	693,0	696,9	100,6	(17,9)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	(155,9)	652,1	(89,7)	(152,1)	169,5	(2,5)
D. SURPLUS / (DEFISIT)	(616,2)	(670,3)	31,7	(689,1)	(734,3)	106,6	9,5
% thd PDB	(2,53)	(2,81)		(2,68)	(2,85)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	742,7	33,9	689,1	734,3	106,6	(1,1)

Sumber: Paparan Laporan Sementara APBN 2026 Semester I, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

Laporan Sementara APBN Semester I-2026

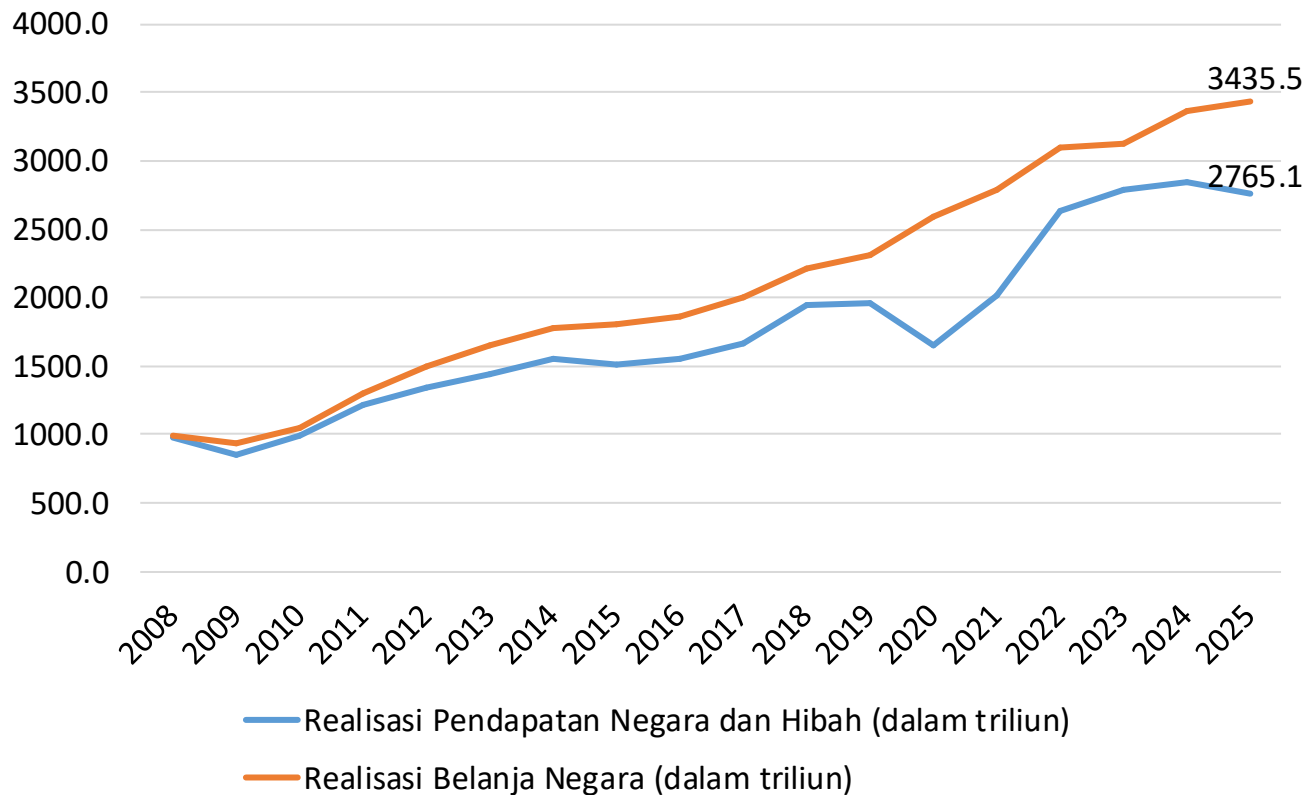
Uraian (triliun rupiah)	2025				2026			
	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	1.201,8	40,0	(9,0)	3.153,6	1.459,4	46,3	21,4
I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	978,3	39,3	(4,8)	2.693,7	1.187,8	44,1	21,4
1. Penerimaan Pajak	2.189,3	831,3	38,0	(7,0)	2.357,7	1.035,7	43,9	24,6
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	147,0	48,7	9,6	336,0	152,0	45,2	3,4
II. PNBP	513,6	222,9	43,4	(22,7)	459,2	271,0	59,0	21,6
III. Penerimaan Hibah	0,6	0,6	108,2	(85,2)	0,7	0,7	104,0	10,2
B. BELANJA NEGARA	3.621,3	1.406,0	38,8	0,6	3.842,7	1.656,0	43,1	17,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	1.003,6	37,1	0,6	3.149,7	1.298,6	41,2	29,4
1. Belanja K/L	1.160,1	470,5	40,6	(3,5)	1.510,5	658,9	43,6	40,0
2. Belanja non-K/L	1.541,4	533,0	34,6	4,4	1.639,2	639,7	39,0	20,0
II. Transfer Ke Daerah	919,9	402,5	43,8	0,6	693,0	357,4	51,6	(11,2)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	52,8	(83,4)	(67,5)	(89,7)	85,1	(94,9)	61,0
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	(616,2)	(204,2)	33,1	164,2	(689,1)	(196,5)	28,5	(3,8)
% thd PDB	(2,53)	(0,84)			(2,68)	(0,76)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	283,6	46,0	68,8	689,1	452,0	65,6	59,4

Sumber: Paparan Laporan Sementara APBN 2026 Semester I, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

Tantangan Ruang Fiskal

1. Peningkatan Belanja Negara Lebih Cepat Dari Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara



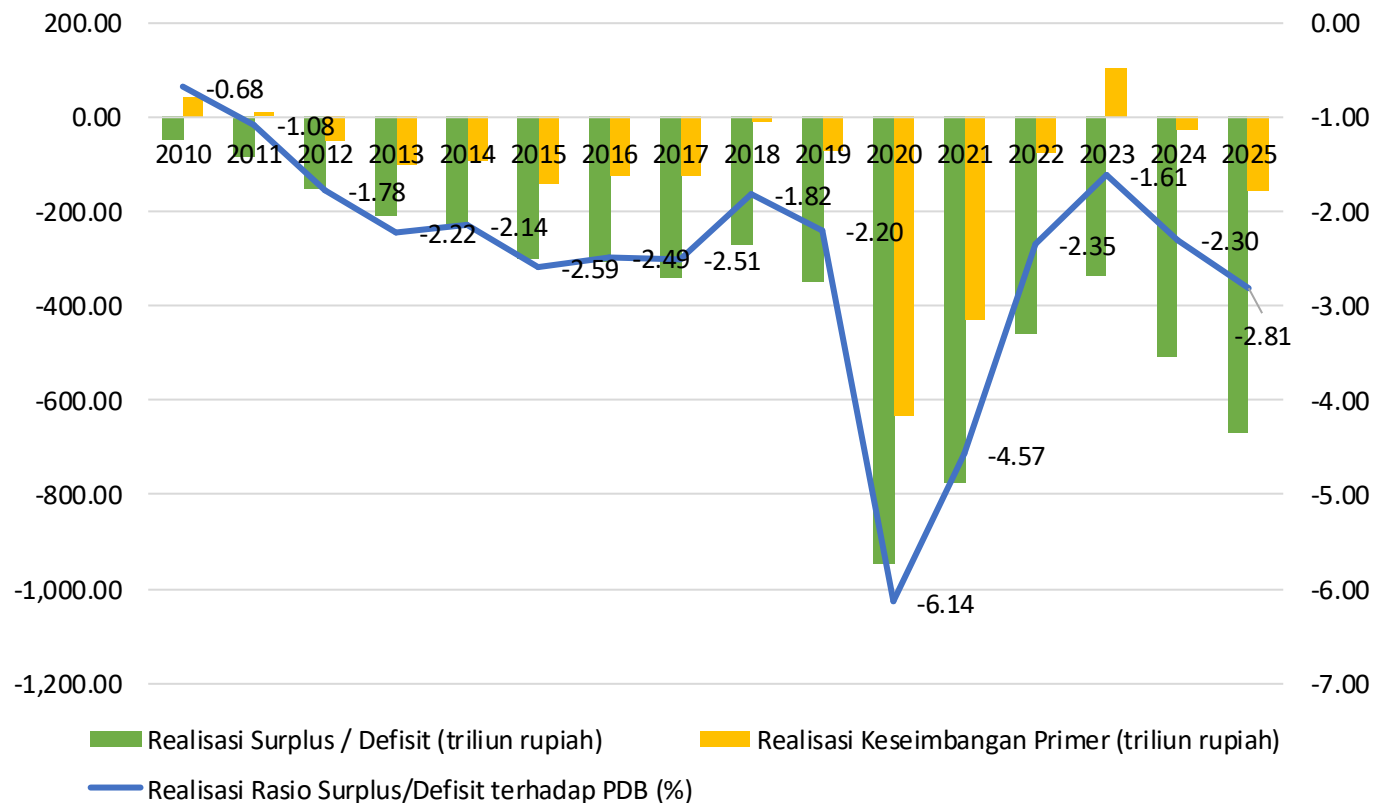
Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

- **Realisasi Belanja Negara lebih besar dari Pendapatan Negara.** Realisasi Belanja Negara di 2025 adalah sebesar 94,87 persen, sementara Pendapatan Negara sebesar 92,01 persen.
- **Realisasi pendapatan negara turun dibandingkan 2024.** Menurunnya jumlah kelas menengah menurunkan potensi pendapatan dari PPh Pribadi.
- APBN 2026 mematok pendapatan dan belanja lebih tinggi dibanding 2025. Angka ini kemudian meningkat kembali pada **outlook APBN 2026** yang dikeluarkan Kemenkeu. Namun demikian **peningkatan Belanja Pemerintah Pusat lebih besar dibandingkan dengan Belanja TKD yang hanya 3,9 triliun rupiah** yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana dan tambahan otsus.
- Pemerintah Pusat perlu **mempertimbangkan penilaian lembaga pemeringkat investasi untuk melakukan evaluasi belanja fiskal** yang dapat mempengaruhi sentiment investor asing (terutama) agar tidak terjadi capital outflow dan depresiasi rupiah yang berimbas pada inflasi dan tekernya suku bunga. Hal yang terjadi dengan outlook adalah belanja justru meningkat dengan kapasitas fiskal yang terbatas dan pemerintah justru mengencakan program lainnya disaat MBG sedang dievaluasi.
- **Menariknya peningkatan Belanja Negara tidak diikuti dengan peningkatan Penerimaan Perpajakan.** Pendapatan Negara meningkat karena mendorong PNPB dan hibah.

Tantangan Ruang Fiskal

2. Defisit dan Keseimbangan Primer Melebar

Realisasi Defisit Anggaran dan Keseimbangan Primer



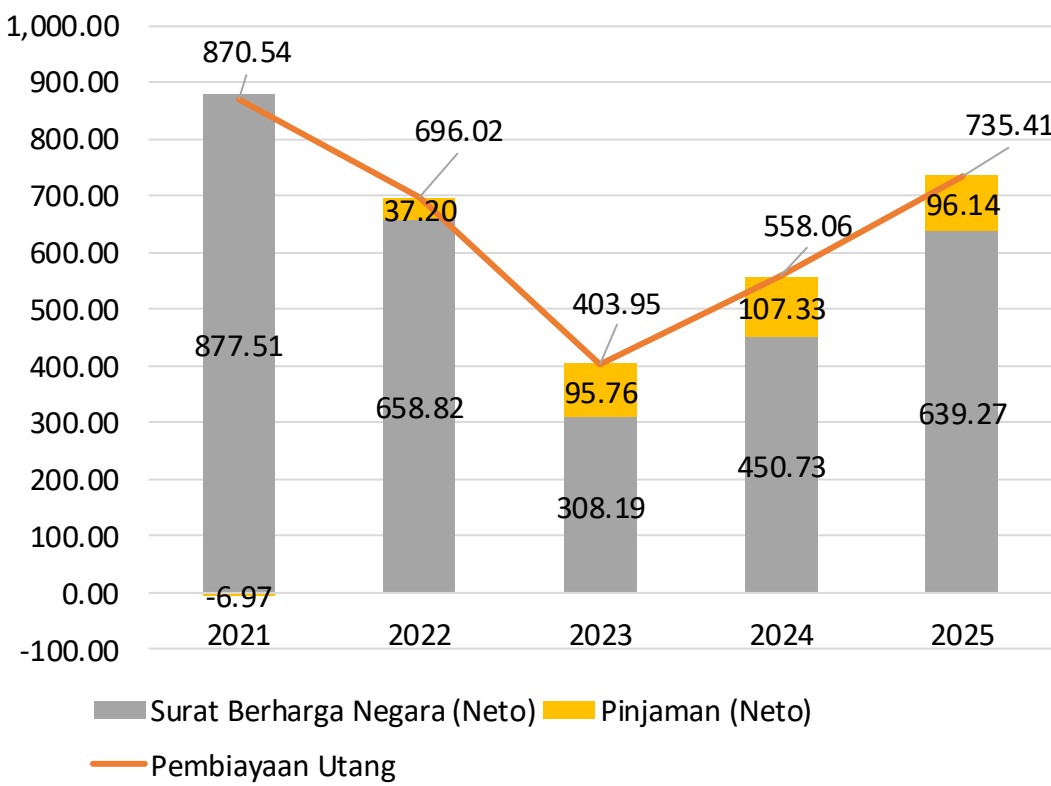
- **Konsekuensi dari peningkatan belanja negara yang lebih tinggi dari pendapatan, maka defisit melebar.** Pelebaran defisit ini juga diikuti dengan pelebaran keseimbangan primer. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara tidak cukup untuk membayar beban bunga utang.
- Pelebaran defisit artinya akan ada **pembiayaan utang yang meningkat**. Artinya adalah utang pemerintah dan beban bunga utang akan meningkat. **Beban yang ditanggung fiskal meningkat ketika defisit melebar.**
- Ketika defisit dan keseimbangan primer melebar, maka kebutuhan utang meningkat, sayangnya hal ini juga terkendala dengan sentiment negatif di pasar keuangan yang membuat SBN kurang diminati, yang menyebabkan peningkatan imbal hasil obligasi atau penambangan beban bunga utang yang lebih tinggi di masa depan. Padahal beban utang jatuh tempo, bunga utang dan cicilan pinjaman tahun berjalan 2026 saja sudah sangat membebani APBN.
- Masyarakat dan bisnis dibayang-bayangi dengan upaya penarikan pajak oleh pemerintah yang dapat menimbulkan tekanan pada masyarakat.

Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

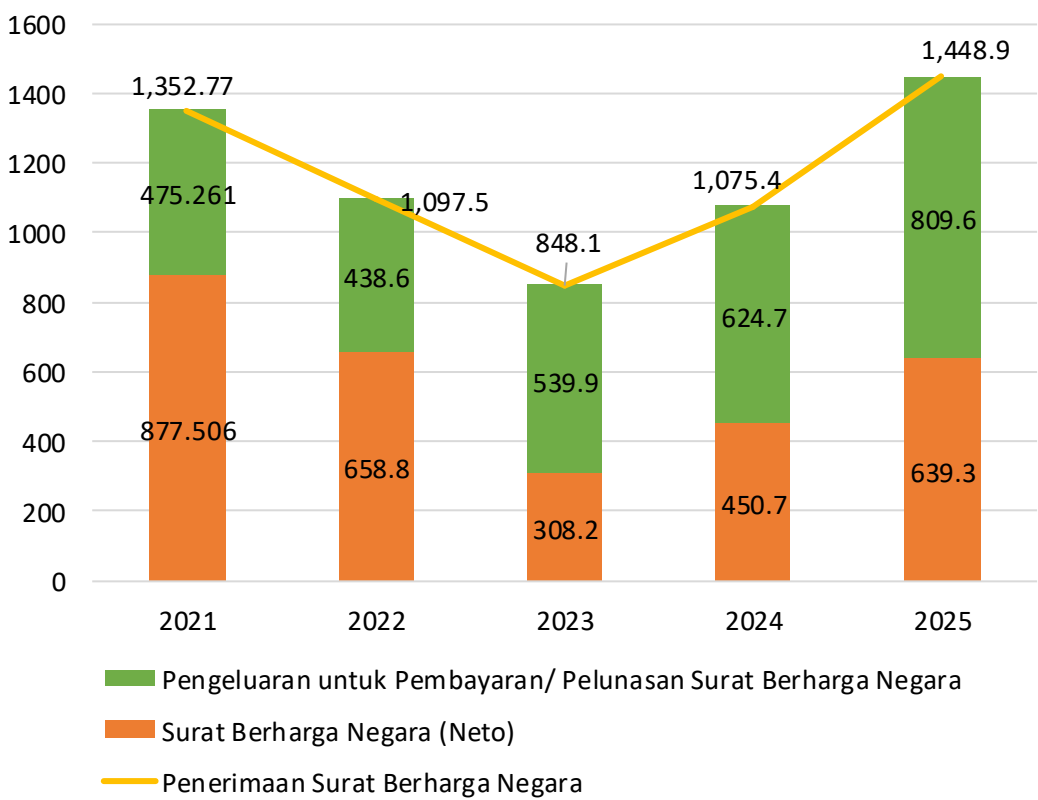
Tantangan Ruang Fiskal

3. Pelebaran Defisit Mendorong Pelebaran Utang

Realisasi Pembiayaan Utang (triliun rupiah)



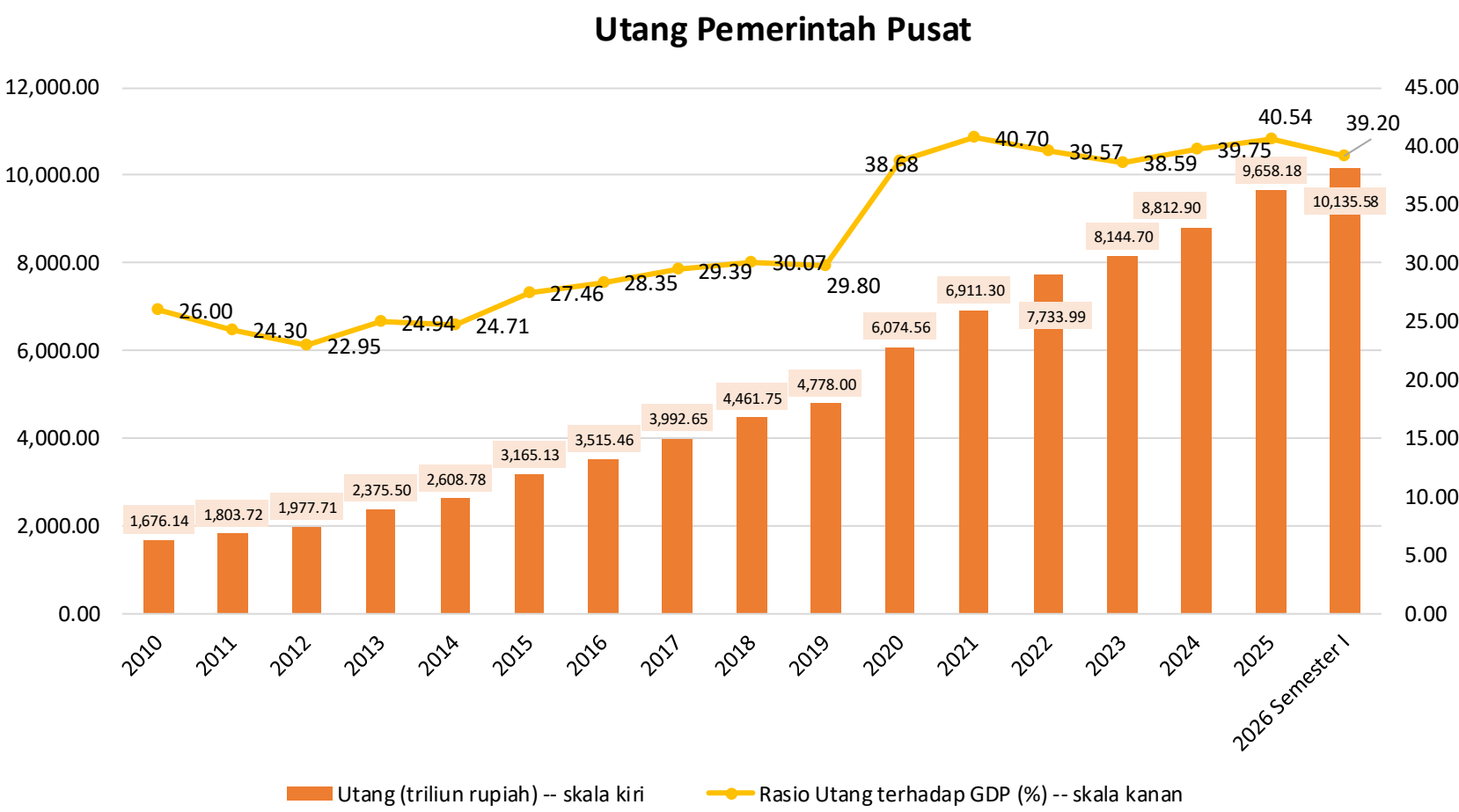
Realisasi Penerimaan Surat Berharga (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

Tantangan Ruang Fiskal

3. Pelebaran Defisit Mendorong Pelebaran Utang

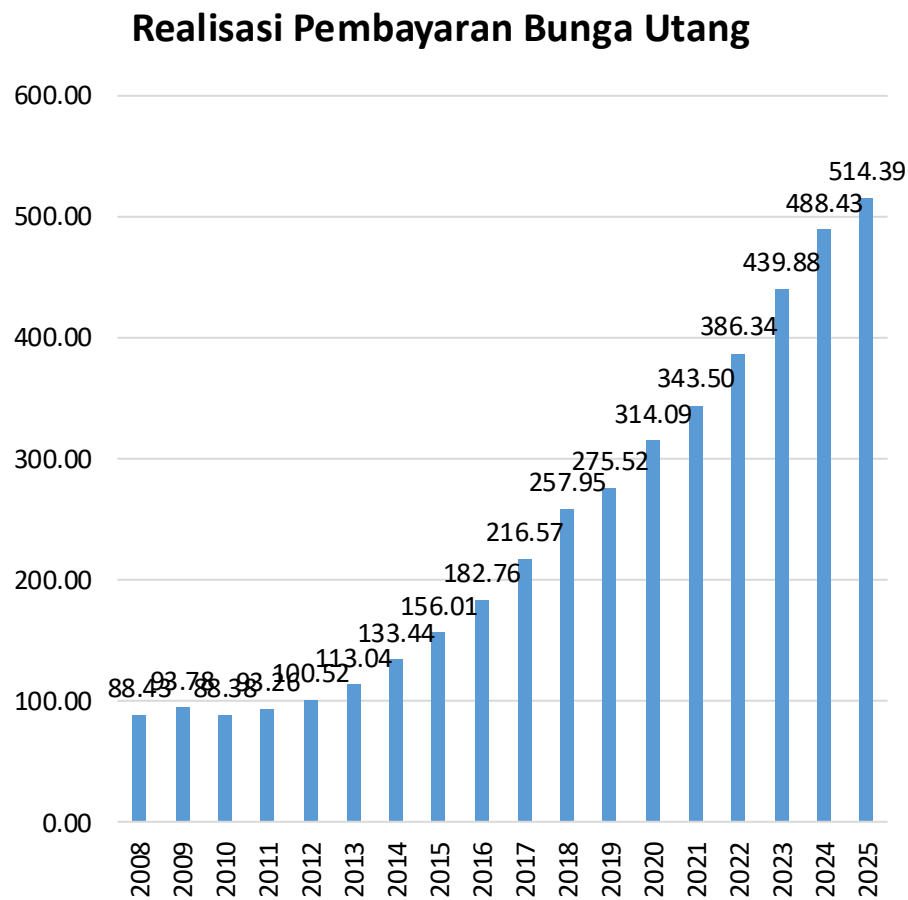


Keterangan:
Nominal PDB 2025 (triliun rupiah): 23,821.1
Nominal PDB 2026 (triliun rupiah): 25,687.5
Artinya asumsi PDB yang digunakan di APBN 2026 adalah sebesar 25,687.5, naik 2,034.16 triliun rupiah dibandingkan 2025.
Pembiayaan anggaran 2026 outlook meningkat, kemungkinan besar pembiayaan utang meningkat akan melebihi 832.2 triliun rupiah.

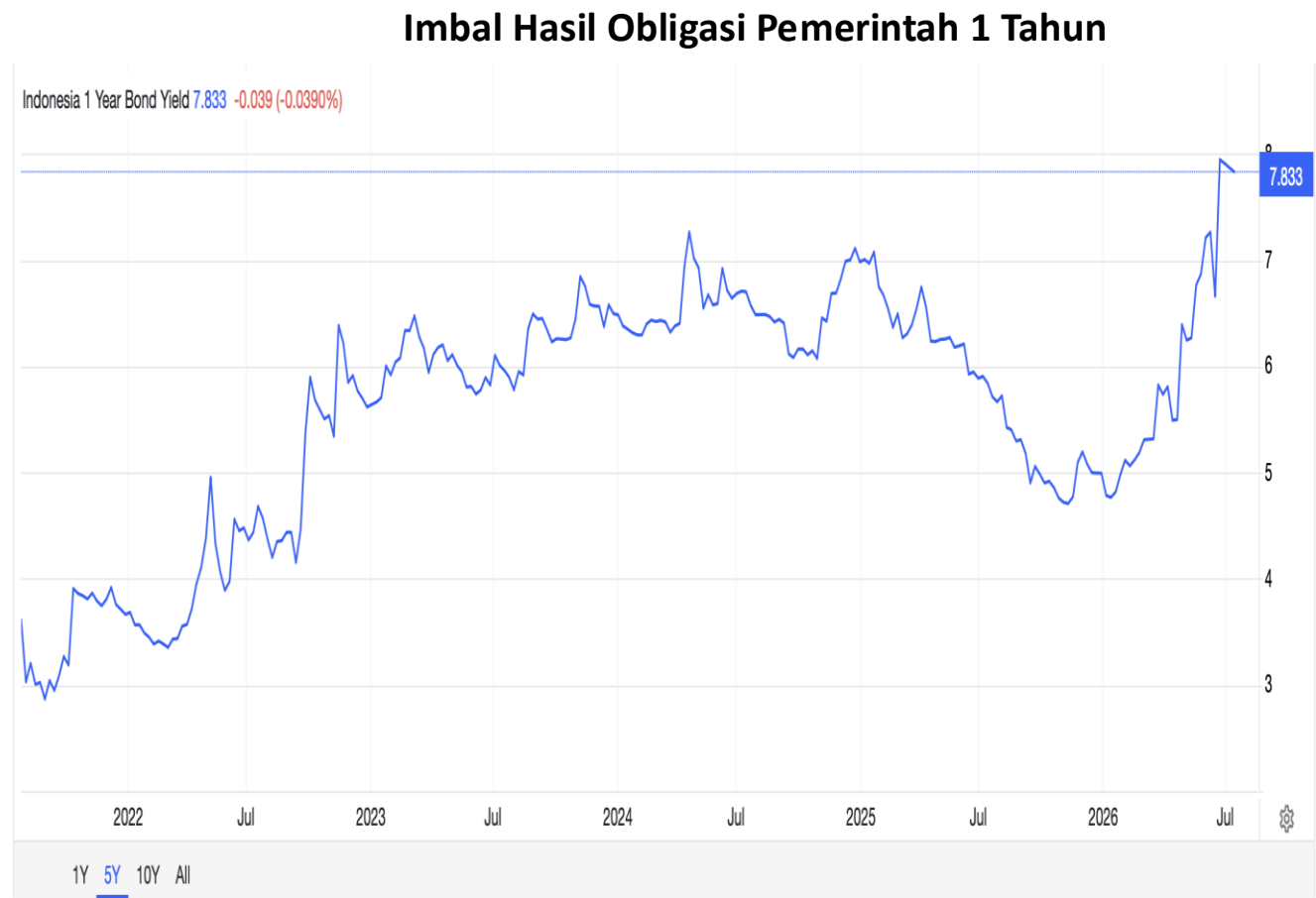
Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

Tantangan Ruang Fiskal

4. Beban Pembayaran Bunga Utang Meningkat Karena Peningkatan Utang dan Imbal Hasil



Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026



Sumber: <https://id.tradingeconomics.com/gidn1y:gov>

Tantangan Ruang Fiskal

4. Beban Pembayaran Bunga Utang Meningkat

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah 10 Tahun



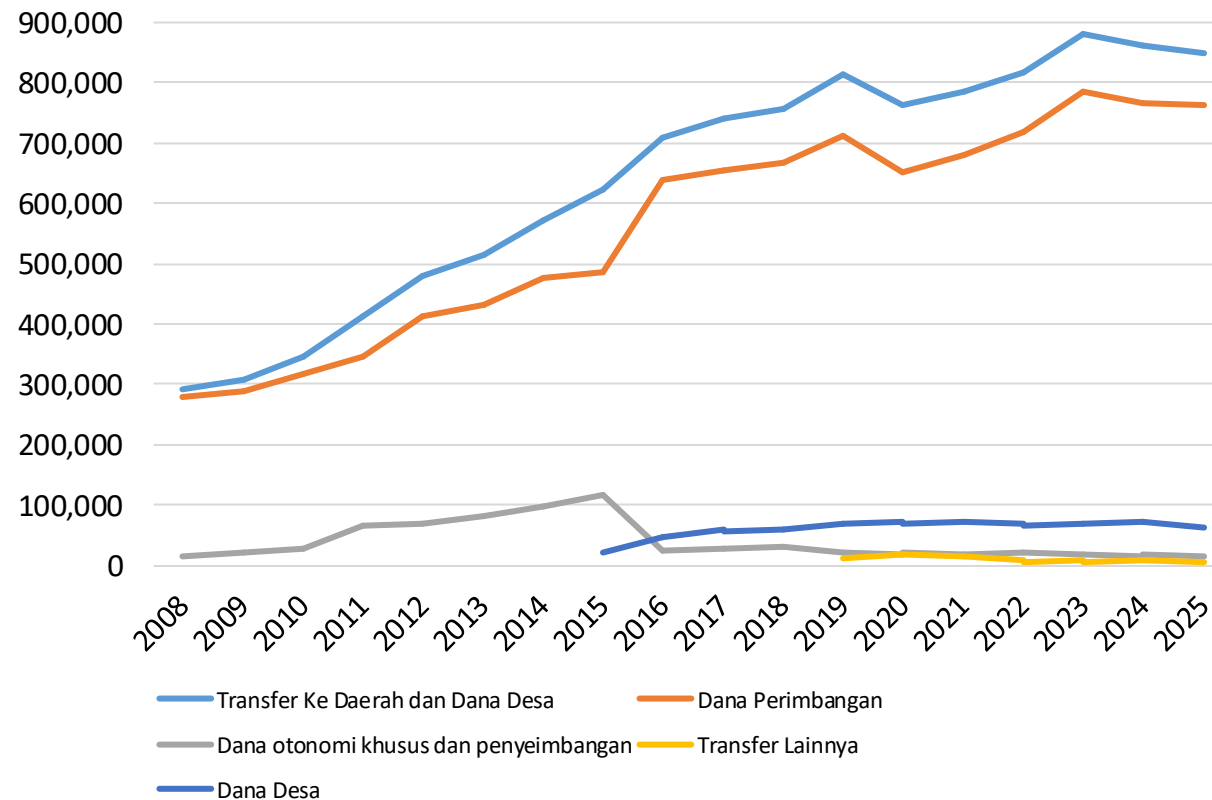
- Imbal hasil obligasi pemerintah 1 tahun mencapai puncak paling tinggi dalam 5 tahun terakhir, artinya pembayaran bunga utang tahun depan (2027) akan melonjak, apalagi ditambah dengan depresiasi rupiah. Tekanan ruang fiskal terutama pada belanja pemerintah pusat akan meningkat.
- Secara rasional investor akan lebih memilih obligasi 1 tahun karena imbal hasil lebih tinggi dengan risiko lebih rendah karena tenornya lebih singkat.

Sumber: <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/government-bond-yield>

Tantangan Ruang Fiskal

5. Penurunan TKD Membuat Daerah Kewalahan

Realisasi Transfer Ke Daerah (dalam miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 2026

- Penurunan TKD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan jalan pintas seperti meningkatkan pajak yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini terjadi di beberapa daerah untuk pajak bumi dan bangunan yang terjadi di 2025.
- **Tahun 2026 TKD kembali dipangkas, kali ini sebanyak 39 pemda dinyatakan tidak mampu bayar gaji PPPK.**
- Jika ini terus berlanjut, maka **potensi bahwa daerah tidak dapat melakukan tugasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal akan semakin besar.** Implikasinya adalah **pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat akan menurun.**
- Hal ini sebenarnya juga menjadi **jalan untuk daerah agar dapat berbenah agar bisa berjalan lebih efisien dan mengikuti aturan yang berlaku** (misal, belanja pegawai menurut Pasal 146 UU HKPD mensyaratkan belanja pegawai pada APBD dibatasi sebesar 30% dari total belanja).
- Di sisi lain penurunan TKD perlu dibarengi dengan pemberitahuan sebelumnya agar daerah bisa lebih siap melakukan perencanaan dan tidak mengambil jalan pintas dengan meningkatkan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya.

Tantangan Ruang Fiskal

5. Penurunan TKD Membuat Daerah Kewalahan

Tabel 3.1 Distribusi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi, 2020–2025
Table The Distribution of Regency/Municipality in Indonesia by Degree of Decentralization Categories, 2020–2025

Kategori Derajat Desentralisasi Degree of Decentralization Categories (1)	Realisasi Realization					Anggaran Budget (7)
	2020	2021	2022	2023	2024	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Sangat Kurang (0–10 %) Very Less	284	272	280	255	239	235
Kurang (>10–20 %) Less	165	154	145	162	172	166
Cukup (>20–30 %) Fair	37	56	51	54	56	67
Sedang (>30–40 %) Medium	12	12	14	19	22	18
Baik (>40–50 %) Good	7	11	13	12	11	14
Sangat Baik (> 50%) Very Good	3	2	6	6	7	8

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah: Kabupaten/Kota dan Provinsi, BPS, 2026

Tabel 3 Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi, 2021–2025
Table The Distribution of Province in Indonesia by Degree of Decentralization Categories, 2021–2025

Derajat Desentralisasi Degree of Decentralization Categories (1)	Realisasi/Realization				Anggaran Budget (6)
	2021	2022	2023	2024	
	(2)	(3)	(4)	(5)	
Sangat Kurang (0-10 %) Very Less	5	5	3	2	3
Kurang (>10-20 %) Less	4	0	2	4	3
Cukup (>20-30%) Fair	4	7	6	6	4
Sedang (>30-40%) Medium	12	6	7	6	8
Baik (>40-50%) Good	5	7	7	8	10
Sangat Baik (>50%) Very Good	8	13	13	12	10
Jumlah/Total	38	38	38	38	38

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi belanja secara menyeluruh dan melakukan skala prioritas agar belanja tidak membengkak. Sehingga bisa menjaga disiplin fiskal (menjaga defisit anggaran), sekaligus mengakomodasi yang menjadi *concern* lembaga internasional pemeringkat investasi agar sentimen bergeser ke arah positif dan *capital outflow* bisa ditekan tanpa meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah.
2. Evaluasi belanja bukan hanya pada program prioritas MBG tapi pada program prioritas lainnya. Lebih baik dimatangkan dulu perencanaannya agar tidak terulang lagi carut marut tata kelola program MBG.
3. Pelebaran utang berarti meningkatkan beban belanja pemerintah pusat di masa datang, sementara sumber pajak utama pemerintah berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPn dan PPh, maka Pemerintah perlu menjaga iklim bisnis dan pendapatan masyarakat.
4. Upaya meningkatkan basis pajak diikuti dengan pendekatan sosialisasi yang lebih baik untuk menghindari simpang siur berita agar dapat direspon lebih positif oleh masyarakat.
5. Meningkatkan komunikasi pusat-daerah, agar penurunan TKD dapat disesuaikan dengan APBD. Ketika TKD dikurangi, ditarik ke pusat, maka perlu ada pengurangan beban tugas daerah dari Pusat. Hal ini perlu perencanaan dan komunikasi yang matang agar kewenangan diikuti dengan penganggaran yang jelas.
6. Penurunan TKD perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar budget digunakan dengan efektif dan efisien.

TERIMA KASIH
